

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PERNYATAAN JURNAL	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR DIAGRAM	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
INTISARI	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Kuasa Wajib Pajak.....	14
1. Tinjauan tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	14

2. Tinjauan tentang Kuasa	22
3. Tinjauan tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Kuasa Wajib Pajak	26
B. Tinjauan Umum tentang Pajak Penghasilan atas Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan	28
1. Tinjauan tentang Pajak Penghasilan	28
2. Tinjauan tentang Jual Beli Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	34
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Sifat Penelitian	39
B. Cara Pengumpulan Data	39
C. Lokasi Penelitian	42
D. Subjek Penelitian	42
E. Alat Penelitian	43
F. Jadwal Penelitian	43
G. Analisis Data	45
H. Hambatan Penelitian	45
I. Cara Mengatasi Hambatan Penelitian	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Kedudukan PPAT sebagai Kuasa Wajib Pajak dalam Penyelesaian Proses Validasi Pajak Penghasilan atas Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan	47
1. Kedudukan PPAT sebagai Kuasa Wajib Pajak dalam Proses Validasi PPh HaTB berdasarkan Peraturan Jabatan PPAT	49

2. Kedudukan PPAT sebagai Kuasa Wajib Pajak dalam Proses Validasi

PPh HaTB Berdasarkan Pasal 32 ayat (3a) UU KUP dalam UU HPP ...52

B. Konsekuensi Hukum Bagi PPAT sebagai Kuasa Wajib Pajak dalam
Penyelesaian

Proses Validasi Pajak Penghasilan atas Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan 57

1. Konsekuensi Hukum bagi PPAT sebagai Kuasa Wajib Pajak Tanpa

Surat Kuasa63

2. Konsekuensi Hukum bagi PPAT sebagai Kuasa Wajib Pajak dengan

Surat Kuasa67

BAB V PENUTUP.....74

A. Kesimpulan74

B. Saran76

DAFTAR PUSTAKA.....77

LAMPIRAN.....82